

Perpanjangan masa jabatan Direksi PTPN diduga beraroma KKN

Jakarta, Palembang Pos.-

Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sugiharto yang diantaranya ditujukan ke Direksi PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), dan ke anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero), pada 24 April 2006 berkaitan pelaksanaan tugas anggota Direksi yang masa jabatannya sudah berakhir pada 30 April 2006, dapat diduga beraroma KKN.

Hal itu ditegaskan M Julian Manurung Ketua Umum DPP FKI-1. Menurutnya, surat tersebut juga dapat dijadikan gambaran, Kementerian Negara BUMN saat ini kurang siap dan bahkan kacau, karena terbukti belum dapat mempersiapkan atau menetapkan anggota Direksi minimal di dua PT Perkebunan Nusantara.

"Surat Meneg BUMN itu

selain aneh, berani, juga berdampak negatif," kata Julian Manurung.

Disatu sisi, pemerintahan SBY-MJK sedang gencar-gencarnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, tetapi disisi lain ada Menteri yang terkesan tidak mendukung. Terbukti, lebih berani/cekatan mengeluarkan surat perpanjangan masa tugas anggota Direksi daripada menetapkan anggota Direksi yang baru.

Negatifnya, ujarnya lagi, anggota Direksi yang telah demisioner, walau diperpanjang, tidak akan dapat mengeluarkan kebijakan, baik ke dalam maupun ke luar. Selain itu, substansi isi surat tersebut menyatakan agar para Direksi tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.

"Ini harus menjadi catatan bagi Presiden SBY dalam men-

catat kinerja atau rapor Meneg BUMN," kata Julian.

Sementara, ditambahkan Julian, pada 3 Mei 2006 pihaknya juga telah menyerahkan data tentang dugaan korupsi di DA PENUS (Dana Pensiunan Perkebunan Nusantara) ke TimTas Tipikor yang diterima Suwandi, Direktur Penyidikan TimTas Tipikor di Gedung Bundar Jakarta Selatan.

Sejak akhir tahun 2005 diduga telah terjadi tindak korupsi di DAPENBUN (Dana Pensiunan Perkebunan) dengan modus penjualan seluruh saham DA PENBUN di DAPENUS ke The Hok Bing, hanya dibayar dengan Promissory Notes (surat pengakuan hutang) yang dikeluarkan PT Victory Indo Perkasa.

"Karenanya, pemerintah harus segera menyelamatkan dana para pensiunan dan karyawan Perkebunan Nusantara I-XIV yang berjumlah sekitar 325.000 orang (1,2 juta jiwa) dan Timtas Tipikor segera bertindak dengan menangkap The Hok Bing Alias Gunawan Witjaksono dan oknum-oknum PT Perkebunan Nusantara yang terlibat," tegas Julian Manurung.

Dijelaskan, DAPENBUN didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) No:XP-SURKP/03.051 dan 27 Juni 2003 telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. (sur)